

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



**KECAMATAN LASEM
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunianya, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran Tahun 2025 yang merupakan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang telah tersusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada Triwulan ketiga, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Perubahan Anggaran Tahun 2024 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, memiliki fungsi yang fundamental dalam system perencanaan daerah, karena Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil yang akan dilaksanakan pada 1 tahun kedepan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Penyusunan Renja Perubahan Anggaran Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, yang dituangkan dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Demikian Renja Perubahan Anggaran Tahun 2025 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, disusun dengan harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2026.

Lasem, 01 Juli 2025



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB	I PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB	II HASIL EVALUASI KERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lasem Triwulan II Tahun 2024
	2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD
BAB	III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
	3.2. Program,Kegiatan dan Sub.Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2025
BAB	IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Perubahan Renja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Perubahan Renja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA perubahan) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD Perubahan) Kabupatendan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Perubahan Provinsi dan APBN Perubahan.

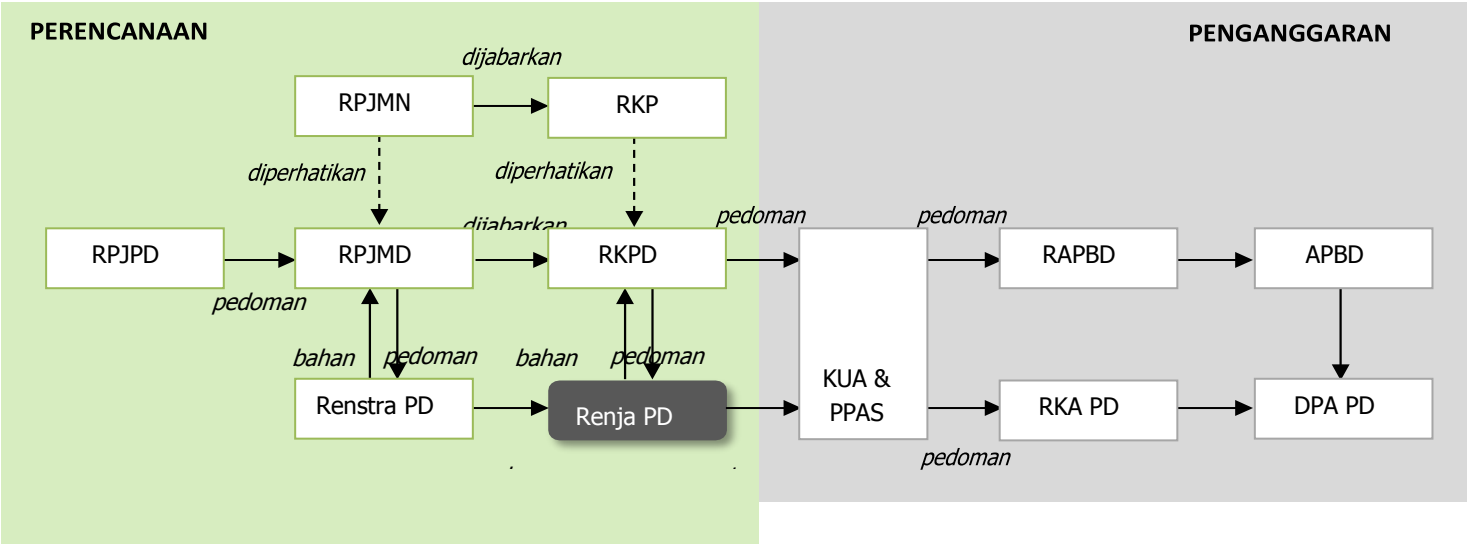
Dokumen Perubahan Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan mengimplementasikan mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam hal ini Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Rancangan Perubahan Renja terdiri dari tahap persiapan, Penyusunan Rancangan Awal, Perumusan Rancangan Akhir dan Tahapan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan kedalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah semester I tahun 2024 dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja semester I pada Renja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025. Tahap penetapan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Perubahan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Gambar1.1



Gambar 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Prinsip Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Lasem
Kabupaten Rembang Tahun 2025 :

1. Substansi Perubahan Renja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang merupakan perbaikan dari materi Rencana Kerja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yang disesuaikan dengan Peraturan Kepala Daerah.
2. Perubahan Renja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dilakukan dalam rangka reformulasi pencapaian target yang telah ditetapkan dan sebagai tindaklanjut atas evaluasi triwulan I dan II/semester I Dokumen Renja Kecamatan Lasem Tahun 2025.
3. Program dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
4. Program dan Kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
5. Perubahan Renja Kecamatan Lasem merupakan Dokumen resmi Program dan Kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2025 dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perubahan setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KPUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Rembang nomor 32 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 15 Tahun 2023 Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan

Program dan Kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2024 bertujuan :

1. Mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Renja semester I Tahun 2025 sebagai bahan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025;
2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun 2025;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan serta sebagai dasar dalam Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran maupun Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran (KUPA -PPAS) Tahun 2025 yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RAPBD) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang

BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang

BAB IV : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025

Kualitas Renja Perangkat Daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Agar dokumen Rencana Kerja yang disusun berkualitas maka diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2024 sampai dengan semester satu. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang sampai dengan semester satu Tahun 2024, yang sudah menyesuaikan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang sampai dengan semester I Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Rembang

Kecamatan Lasem

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program <i>(outcome)</i> / Kegiatan <i>(output)</i> / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(9/4)*100
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	68 angka	68 angka	68 angka	50 angka	0.00%	68 angka	50%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	97.50%	97.50%	97.50%	50%	50%	97.50%	50%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	100%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	2 laporan	50%	4 laporan	50%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik	100%	100%	100%	68%	25%	100%	0

7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 org/bl	21 org/bl	21 org/bl	21 org/bl	100%	21 org/bl	41
-----------------	-----------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	----

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(9/4)*100
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 1 Dokumen	25%	12 Dokumen	8,3%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100%	100%	100%	25%	25.00%	100%	25%
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	21 dokumen	21 dokumen	21 dokumen	3 dokumen	25%	21 dokumen	0%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	99%	99%	99%	25 %	25%	99%	25%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	25 paket	25%	1 paket	25%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	25 paket	25%	1 paket	25%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program <i>(outcome)</i> / Kegiatan <i>(output)</i> / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(9/4)*100
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	50%	1 paket	50%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	25%	1 paket	25%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	25%	1 paket	25%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	25%	12 Laporan	20,8%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	25 %	250%	100%	25%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%	3 Laporan	208%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(9/4)*100
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	3 Laporan	25%	12 laporan	208%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	2 Laporan	17%	12 laporan	208%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik	100 %	100 %	100 %	21%	22%	100 %	29,4%
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 unit	20%	12 Laporan	133%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	100%	100%	100%	25%	25.00%	100%	25%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(9/4)*100
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	25%	25.0%	100%	25%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0%	12 Laporan	0%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang Ditangani	100%	100%	100%	25%	25.00%	100%	0%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0%	12 Laporan	0%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	69%	69.00%	100%	0%
		Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	16 Desa	16 Desa	16 Desa	2 Desa	33%	16 Desa	0%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ Tepat Waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	100%	100%	100%	69%	69%	100%	0%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(9/4)*100
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	100%	10 Lembaga	100%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	20%	12 Laporan	76%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	25%	25.00%	100%	63%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	25%	25.00%	100%	63%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	10%	12 Laporan	94%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	25%	25.00%	100%	100%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(9/4)*100
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	25%	25.00%	100%	63%
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	100 orang	10 Lembaga	0 orang	0%	10 Lembaga	89%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Baik	100%	100%	12 Laporan	25%	26%	12 Laporan	62%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	100	100	100%	-	0.0%	100%	96%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	0 Dokumen	0%	10 Lembaga	95%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program <i>(outcome)</i> / Kegiatan <i>(output)</i> / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(9/4)*100
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	0 Dokumen	0%	20 Dokumen	67%
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0 Dokumen	0%	2 Dokumen	67%

Tabel 2.2
Realisasi Kinerja dan Keuangan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Triwulan
I Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025			Anggaran dan Realisasi keuangan Triwulan I Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025		
			Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Triwulan I Tahun 2025	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9= (8/7)*100
KECAMATAN LASEM								
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01	KECAMATAN					2.072.192.500	474,749,483	21.19%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	68 angka	0 angka	0.00%	2.003.915.600	513,448.006	20.67%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	97.50%	25.00%	26%	2.719.900	-	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	0%	1.359.500	-	0!
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	2 laporan	50%	1.360.400	-	0!
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik	100%	68%	68%	1.883.260.000	440.715.630	23,40%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 org/bl	21 org/bl	25%	1.819.875.000	43.5395.630	2,39%
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	61.680.000	4.640.000	7,52%

7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	1.705.000	680.000	39,88%
-----------------	---	--	-----------	-----------	------	-----------	---------	--------

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025			Anggaran dan Realisasi keuangan Triwulan I Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025		
			Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Triwulan I Tahun 2025	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9= (8/7)*100
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100%	25%	25.00%	1.715.000	-	0!
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	21 okumen	21 dokumen	25%	1.715.000	-	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100%	61%	61%	56.462.700	9.934.800	17,59%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	0 paket	0%	1.718.000	-	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga Kantor yang Disediakan	1 paket	5 paket	100%	4.269.000	-	00%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1paket	3 paket	50%	8.802.200	4.096.300	46,53%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	2 paket	40%	3.605.200	-	0%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	3 paket	50%	9.868.300	388.500	3,94%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	3 Laporan	50%	28.200.000	5.450.000	19,32%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	73%	25%	34%	450,000,000	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025			Anggaran dan Realisasi keuangan Triwulan I Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025		
			Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Triwulan I Tahun 2025	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9= (8/7)*100
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	0 unit	0%	450,000,000	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	20%	20.0%	48.603.000	21.199.676	43,61%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0 Laporan	0%	1.200.000	-	0!
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	25%	19.800.000	2.797.676	14,12%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2 Laporan	17%	27.603.000	18.402.000	66,6%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik	95%	21%	22%	11.120.000	5.190.000	46,67%
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 unit	3 unit	20%	11.120.000	5.190.000	46,67%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	100%	25%	25.00%	7.250.000	3.750.000	51,7%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	25%	25.0%	3.750.000	3.750.000	51,72%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025			Anggaran dan Realisasi keuangan Triwulan I Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025		
			Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Triwulan I Tahun 2025	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9= (8/7)*100
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	0 Laporan	0%	3.750.000	3.750.000	51,72%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang Ditangani	100%	25%	25.00%	3.500.000	-	0
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	16 Laporan	0 Laporan	0%	3.500.000	-	0.00%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	100%	69%	69.00%	41.242.900	23,047,200	55,88%
		Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	6 Desa	2 Desa	33%			0!
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ Tepat Waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	100%	69%	69%	41.242.900	23,047,200	55,88%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	16 Lembaga	16 Lembaga	100%	29.117.900	23.467.900	80,594%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	2 Laporan	20%	12.125.000	3.500.000	28,86%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	25%	25.00%	12.784.000	5.690.000	18.70%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	25%	25.00%	12.784.000	5.690.000	44,5%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025			Anggaran dan Realisasi keuangan Triwulan I Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025		
			Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Triwulan I Tahun 2025	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9= (8/7)*100
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	1 Laporan	33%	12.784.000	5.690.000	44,5%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	25%	25.00%	2,000,000	-	0.00%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	25%	25.00%	2.000,000	-	0.00%
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	0 orang	0%	2.,000,000	-	0.00%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Baik	96%	25%	26%	5.000.000	-	0.00%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	96.25	-	0.0%	5.000.000	-	0.00%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1.000.000	-	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	2.000.000	-	0.00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025			Anggaran dan Realisasi keuangan Triwulan I Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025		
			Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Triwulan I Tahun 2025	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9= (8/7)*100
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	-	-	0.00%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	2,000,000	-	0.00%
7.01.06.2.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	2,000,000	-	0.00%

Dari data sebagaimana tabel 2.1 dan diperjelas dengan tabel 2.2. tersebut di atas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021- 2026 sampai dengan semester I tahun 2024 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Semester I Tahun 2025 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 urusan, 6 program dengan 6 indikator kinerja program, dan 12 kegiatan
 - a) Dari 6 indikator kinerja program, terdapat 6 indikator yang telah tercapai, sedangkan 1 indikator masih dalam proses pencapaian target.
 - b) Dari 12 indikator kinerja kegiatan, 12 indikator masih dalam proses pencapaian target.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Semester I Tahun 2024 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 6 program dengan 6 indikator program dan 12 kegiatan
 - b) Dari 6 indikator kinerja program, masih dalam proses pencapaian target.
 - c) Dari 12 indikator kinerja kegiatan, masih dalam proses pencapaian target.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG

Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Pelayanan Publik yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Rembang **Nomor 79 Tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan

Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang sebagaimana dalam Peraturan Bupati Rembang **Nomor 6 Tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan dalam urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang **Nomor 2 Tahun 2021** Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang **Tahun 2021–2026**, indikator kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan capaian indikator kinerja pelayanan.

Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang sesuai dengan tugas dan fungsinya berupaya mewujudkan kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dirumuskan dan dikaji berdasarkan format ***Tabel T.C.30, berikut:***

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Triwulan I Tahun 2025

NO.	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	SPM	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI		Catatan analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	TW I Th. 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Renstra 2021-2026														
1	Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan														
	Sasaran: meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan														
	- Indeks Pelayanan Publik	-	-	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.1	3.2	3.3	0	3.4	3.5	
	- Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	85,5	85,75	86	86,25	86,5	86,51	77,64	97,7	0	97,8	97	

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang sampai Triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

a. Tujuan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dalam upaya mencapai tujuan tersebut memiliki indicator kinerja, yaitu:

- Target Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Lasem tahun 2022 yaitu 3,1 dengan nilai realisasi 3,1;
- Target Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Lasem tahun 2023 yaitu 3,2 dengan nilai realisasi 3,2;
- Target Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Lasem tahun 2024 yaitu 3,3 dengan nilai realisasi 3,3;
- Target Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Lasem tahun 2025 yaitu 3,4;
- Target Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Lasem tahun 2026 yaitu 3,5.

b. Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan, dalam upaya mencapai sasaran tersebut memiliki indicator kinerja sebagai berikut:

- Target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lasem Tahun 2022 yaitu 85,5 dengan realisasi nilai 86,51;
- Target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lasem Tahun 2023 yaitu 85,75 dengan realisasi nilai 77,64;
- Proyeksi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lasem Tahun 2024 yaitu 86 dengan realisasi nilai 97,7;
- Proyeksi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lasem Tahun 2025 yaitu 97,8;
- Proyeksi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lasem Tahun 2026 yaitu 97;

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

Perumusan Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan Program dan Kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD.

Identifikasi permasalahan yang tepat sangat dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Identifikasi tersebut didasarkan pada analisis isu-isu strategis proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang telah dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang sebelumnya.

Tugas dan Fungsi Kecamatan Lasem dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal dan aspiratif bagi pengguna layanan yaitu masyarakat. Oleh karena itu mandat yang diberikan masyarakat merupakan bagian dari perencanaan tidak boleh diabaikan. Identifikasi permasalahan terkait tugas pokok fungsi Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, yaitu :

1. Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan standar kebutuhan suatu unit kerja;
2. Masih ada penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi Pendidikan dan keahlian;
3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini menghambat sifat inovasi dan kreatifitas para pegawai¹⁰ yang ada; dan kualitasnya;
4. Belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran;

5. Sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindaklanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan;
6. Belum adanya tenaga fungsional perencanaan dan peneliti;

Dengan adanya identifikasi permasalahan diatas apabila tidak diantisipasi dengan kekuatan yang ada akan menjadi hambatan dan apabila tidak ada Tindakan yang dilakukan maka akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan identifikasi maka disusun alternatif strategi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan produk perencanaan yang implementatif ;
2. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi untuk mendukung kegiatan statistik ;
3. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan prima ;
4. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM perencana melalui Pendidikan dan Pelatihan teknis ;
5. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya
6. Peningkatan pemahaman bersama tentang proses dan mekanisme dalam konsistensi perencanaan dan penganggaran ;
7. Rancangan awal arah perencanaan dari sektoral menjadi kewilayahan ;
8. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui berbagai forum yang diselenggarakan ;
9. Memberikan keleluasaan kepada staf untuk berinovasi dan berkreasi dalam rangka meningkatkan kinerjanya sesuai kapasitas.

A. Isu Strategis

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 terdapat 7 ¹¹ (tujuh) isu strategis yaitu (1) Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, (2) Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memiliki daya saing

yang optimal serta pelayanan dasar yang masih memerlukan peningkatan, (3) Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan perlunya pemantaban penyediaan infrastruktur, serta rendahnya ketersediaan air baku, (4) Perlunya penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian, (5) Masih tingginya angka kemiskinan, (6) Meningkatnya ancaman krisis akibat perubahan iklim dan penyakit menular (wabah, epidemi, dan pandemi) dan (7) Perlunya penguatan kemandirian desa.

Dari ketujuh isu strategis tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah isu strategis pertama yaitu “ **Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan** “

Rumusan isu strategis Renstra Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Perlunya penguatan kebijakan pelayanan
 2. Peningkatan profesionalisme SDM pelayanan publik
 3. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik
 4. Transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan
- B. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Rekomendasi dan catatan strategis menilik dari permasalahan, tantangan dan peluang adalah sebagai berikut:
1. Program unggulan digitalisasi birokrasi dan Rembang Smart City dalam rangka terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel.
 2. Penerapan digitalisasi birokrasi melalui pemanfaatan sistem single Sign On (SSO) dalam rangka mendorong penerapan teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Rembang.

2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Tahun 2023 masih dalam tahun pelaksanaan RPJPD Kabupaten Rembang tahun 2005 - 2025 dan awal tahun pelaksanaan RPJMD 2021-2026. Sehingga dalam penyusunan Dokumen RKPD tahun 2022 berpedoman pada Dokumen RPJPD 2005-2025 dan RPJMD tahun 2021-2026.
2. Berdasarkan RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 dan permasalahan serta isu strategis pembangunan sebagaimana disajikan dalam Bab II, maka pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2023 diarahkan pada Tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Perekonomian Daerah, Kualitas Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif”. Tema ini di realisasikan melalui prioritas RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2022, dengan refocusing pada program dan kegiatan yang terkait (i) mitigasi dampak kesehatan; (ii) mitigasi dampak ekonomi; (iii) langkah-langkah recovery ekonomi dan sosial sebagai respon pasca bencana Covid-19. Adapun Prioritas RKPD kabupaten Rembang tahun 2023 sebagai berikut:
3. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan;
4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yg berdaya saing
5. Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan;
6. Peningkatan ketersediaan air baku;
7. Pemantapan pengendalian tata ruang dan infrastruktur
8. Penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian; dan
9. Penurunan Ancaman Krisis akibat Bencana Alam, Perubahan Iklim dan Penyakit Menular (Wabah, Epidemic, dan Pandemic).
10. Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2024 yaitu: **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Perekonomian Daerah, Kualitas Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif”**
11. Prioritas RKPD tahun 2025 dan keterkaitannya dengan arah kebijakan RPJPD kabupaten Rembang 2005-2025.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Rembang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025 harus pula memperhatikan aspek keselarasan dengan Rencana Kerja Pemerintah Pusat maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

12. Review terhadap RKPD Kabupaten Rembang sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tentang perbandingan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang untuk tahun anggaran 2025. Selain itu review juga berisikan penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan catatan penting. Pagu indikatif dalam Rencana Kerja Kecamatan Lasem diisi berdasarkan berdasarkan matrik indikasi rencana program dan pendanaan Bab VII RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Rincian review dimuat berdasarkan format **Tabel T-C.31** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang
TAHUN 2025

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan RKPD Perubahan 2025	Catata n Pentin g
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						KECAMATAN LASEM				3.449.426.000,00	KECAMATAN LASEM				2.246.875.143,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.449.426.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				2.246.875.143,00	
	7	01				KECAMATAN				3.449.426.000,00	KECAMATAN				2.246.875.143,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Lase m	Nilai SAKIP OPD Kec. Lasem	68 Angka	3.124.426.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Lase m	Nilai SAKIP OPD Kec. Lasem	68 Angka	2.183.848.243,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Lase m	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	95 %	10.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Lase m	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	95 %	2.719.900,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
							Kec. Lase m	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.000.000,00		Kec. Lase m	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.109.500,00	
	7	0	0	2.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat					Evaluasi Kinerja					

		1	1	1	7	Daerah					Perangkat Daerah					
							Kec. Lase m	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	6.000.000,00		Kec. Lase m	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	860.400,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	2.066.126.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	1.883.260.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	1.998.126.000,00			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	1.962.652.643,00	
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	62.000.000,00			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	61.680.000,00	
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.000.000,00			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	805.000,00	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		% dokumen kepegawaian yang dikelola	100 %	5.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		% dokumen kepegawaian yang dikelola	100 %	1.750.000,00	
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					

							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	21 Dokumen	5.000.000,00			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	21 Dokumen	750.000,00	
	7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan umum	100 %	144.200.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		% pemenuhan pelayanan umum	100 %	56.462.700,00	
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi				Penyediaan Komponen Instalasi					
					1	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.718.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.500.000,00			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.269.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.802.200,00	
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					

							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.605.200,00	
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan/Material				Penyediaan Bahan/Material					
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	24.000.000,00			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	9.868.300,00	
	7	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35.700.000,00			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	14.225.000,00	
	7	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	200.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	0,00	
	7	0	0	2.0	000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	100.000.000,00			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	0,00	
	7	0	0	2.0	000	Pengadaan Mebel				Pengadaan Mebel					

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	25.000.000,00			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0,00	
	7	0	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	60.000.000,00			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00	
	7	0	0	2.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	15.000.000,00			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	
	7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	164.100.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	48.603.000,00		
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.200.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.800.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	132.100.000,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	73.608.000,00	
	7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BMD dengan kondisi baik	85 %	535.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% BMD dengan kondisi baik	85 %	11.120.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15.000.000,00			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	16.895.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	30.000.000,00			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	0,00	
	7	0	0	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000,00			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	
	7	0	0	2.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	450.000.000,00			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00	
2	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	100 %	60.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	100 %	8.250.000,00	
	7	0	0	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100 %	30.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100 %	3.750.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	30.000.000,00			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3.750.000,00	

	7	0	0	2.0		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		% Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	30.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		% Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	3.500.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	30.000.000,00			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	4.500.000,00	
3	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah Desa dengan Swasembada Masyarakat	12 Desa	95.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah Desa dengan Swasembada Masyarakat	12 Desa	34.992.900,00	
	7	0	0	2.0		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Pelaksanaan Pembangunan secara swakelola Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ Tepat waktu	100 %	95.000.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Pelaksanaan Pembangunan secara swakelola Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ Tepat waktu	100 %	41.242.900,00	
	7	0	0	2.0	000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	35.000.000,00			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	23.467.900,00	
	7	0	0	2.0	000	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	60.000.000,00			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	11.525.000,00	
4	7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	50.000.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	12.784.000,00	
	7	0	0	2.0		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	50.000.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase penyelesaian permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	12.784.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					

							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	50.000.000,00			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12.784.000,00	
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	30.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	2.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	30.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	2.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	30.000.000,00			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	2.000.000,00	
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik	100 %	90.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik	100 %	5.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata- rata IKM Desa Rata-rata IKM Desa	72 Nilai 76 nilai	90.000.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rata- rata IKM Desa Rata-rata IKM Desa	72 Nilai 76 nilai	5.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	20.000.000,00			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	2.500.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Fasilitasi Pengelolaan				Fasilitasi Pengelolaan					

		1	6	1	3	Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Dokumen	30.000.000,00			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Dokumen	2.500.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	18 Dokumen	40.000.000,00			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	18 Dokumen	0,00	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Mencermati Isu-isu Strategis Tahun 2025, maka tujuan dari Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025 adalah :

1. Menterjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran Pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lasem yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026;
2. Menetapkan dan Kegiatan prioritas dan beserta insikasi pagu anggaran dan target indicator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja pelayanan Kecamatan Lasem yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
4. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Lasem untuk melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, dan
5. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program , Kecamatan Lasem yang pada capaian tujuan Pembangunan baik tingkat Provinsi maupun Nasional.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Lasem Tahun 2025 ini adalah dalam rangka :

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2025 secara tertib waktu dan tepat mutu, dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026, sebagaimana **Tabel 3.1**, berikut :

Tabel 3.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat
 Daerah Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang
 Tahun 2021 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASA RAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik / IPP	angka	31	31	31	32	33	34	35
			Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	angka	86,08	85,5	85,5	85,75	86	86,25	86,5

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan Pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

Program dan Kegiatan Kecamatan Lasem Tahun 2025 direncanakan berdasarkan Analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025, sehingga mengalami beberapa perubahan kembali.

Perubahan yang terjadi lebih pada ***pengurangan Pagu Indikatif*** di Tahun 2025.

Adapun perbandingan antara Analisa kebutuhan dalam rancangan renja Kecamatan Lasem Tahun 2025 dengan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2025, seperti pada **Tabel 3.2**, berikut :

Tabel 3.2.
Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan
Sub.Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan
Prakiraan Maju Tahun 2025

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025						Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2					3	4		8	9	10	11	12	14	15	18	19
						KECAMATAN LASEM					3.449.426.000,0 0	2.072.192.500,0 0	2.246.875.143,0 0				3.010.200.000,0 0
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					3.449.426.000,0 0	2.072.192.500,0 0	2.246.875.143,0 0				3.010.200.000,0 0
	7	0 1				KECAMATAN					3.449.426.000,0 0	2.072.192.500,0 0	2.246.875.143,0 0				3.010.200.000,0 0
1	7	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Kec. Lasem	Kec.Lase m	68 Angka	68 Angka	3.124.426.000,0 0	2.003.915.600,0 0	2.183.848.243,0 0	PAD, DAU		70,5	2.818.200.000,0 0
	7	0 1	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah		95 %	95 %	10.000.000,00	2.719.900,00	2.719.900,00	PAD	-	95 %	10.700.000,00

	7	0	0	2.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	1.359.500,00	1.109.500,00	Pajak Daerah	-	2 Dokumen	4.200.000,00
	7	0	0	2.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	1.360.400,00	860.400,00	Pajak Daerah	-	1 Laporan	6.500.000,00
	7	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik		100 %	100 %	2.066.126.000,00	1.883.260.000,00	1.883.260.000,00		-	100 %	2.102.000.000,00
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1.998.126.000,00	1.819.875.000,00	1.962.652.643,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	19 Orang/bulan	2.000.000.000,00
	7	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	12 Dokumen	62.000.000,00	61.680.000,00	61.680.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Dokumen	95.000.000,00
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	1.705.000,00	805.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	7.000.000,00
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% dokumen kepegawaian yang dikelola		100 %	100 %	5.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00		-	100 %	6.000.000,00
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		21 Dokumen	21 Dokumen	5.000.000,00	1.750.000,00	750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	21 Dokumen	6.000.000,00
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan umum		100 %	100 %	144.200.000,00	56.462.700,00	56.462.700,00		-	100 %	159.500.000,00

	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	1.718.000,00	1.718.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Paket	15.500.000,00
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Paket	28.000.000,00
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	9.500.000,00	4.269.000,00	4.269.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Paket	10.000.000,00
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	8.802.200,00	10.802.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Paket	26.000.000,00
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	3.605.200,00	3.605.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Paket	17.000.000,00
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material											
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	24.000.000,00	9.868.300,00	9.868.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Paket	25.000.000,00
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	12 Laporan	35.700.000,00	28.200.000,00	14.225.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		38.000.000,00
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	200.000.000,00	0,00	0,00		-		170.000.000,00
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	3 Unit	150.000.000,00
	7	0 1	0 1	2.0 7	000 5	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Unit	5.000.000,00
	7	0 1	0 1	2.0 7	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		7 Unit	7 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	7 Unit	10.000.000,00
	7	0 1	0 1	2.0 7	001 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3 Unit	3 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	3 Unit	5.000.000,00

	7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	100 %	164.100.000,00	48.603.000,00	48.603.000,00		-	100 %	168.500.000,00
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	2.500.000,00
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	31.000.000,00
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	132.100.000,00	27.603.000,00	73.608.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	135.000.000,00

	7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BMD dengan kondisi baik		85 %	85 %	535.000.000,00	11.120.000,00	11.120.000,00		-		201.500.000,00
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		15 Unit	15 Unit	15.000.000,00	11.120.000,00	16.895.000,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	15 Unit	16.000.000,00
	7	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		15 Unit	15 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	15 Unit	5.500.000,00
	7	0	0	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi		1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00
	7	0	0	2.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	3 Unit	450.000.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3 Unit	150.000.000,00
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat		100 %	100 %	60.000.000,00	7.250.000,00	8.250.000,00			100 %	55.000.000,00
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani		100 %	100 %	30.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00		-	100 %	40.000.000,00
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	12 Laporan	40.000.000,00

	7	0	0	2.0		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	% Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		100 %	100 %	30.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		-	100 %	15.000.000,00
	7	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	12 Laporan	15.000.000,00
3	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Desa dengan Swasembada Masyarakat		12 Desa	12 Desa	95.000.000,00	41.242.900,00	34.992.900,00			12 Desa	87.000.000,00
	7	0	0	2.0		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembangunan secara swakelola Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ Tepat waktu		100 %	100 %	95.000.000,00	41.242.900,00	41.242.900,00		-	100 %	87.000.000,00
	7	0	0	2.0	000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	35.000.000,00	29.117.900,00	23.467.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	10 Lembaga Kemasyarakatan	32.000.000,00
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	12.125.000,00	11.525.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	12 Laporan	55.000.000,00
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum		100 %	100 %	50.000.000,00	12.784.000,00	12.784.000,00			100 %	20.000.000,00
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100 %	100 %	50.000.000,00	12.784.000,00	12.784.000,00		-	100 %	20.000.000,00
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											

[illegible]

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		100 Orang	100 Orang	30.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	100 Orang	5.000.000,00
6	7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik	100 %	100 %	90.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			100 %	25.000.000,00

	7 1	0 6	0 1	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata- rata IKM Desa Rata-rata IKM Desa		72 Nilai 76 nilai	72 Nilai 76 nilai	90.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		-	72 Nilai 76 nilai	25.000.000,00
	7 1	0 6	0 6	2.0 1	000 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4 Dokumen	10.000.000,00
	7 1	0 6	0 6	2.0 1	000 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		20 Dokumen	20 Dokumen	30.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	20 Dokumen	15.000.000,00
	7 1	0 6	0 6	2.0 1	000 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa											

							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		18 Dokumen	18 Dokumen	40.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	18 Dokumen	0,00

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program dan kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.1 Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Lasem pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Lasem ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Lasem Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Lasem;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Lasem ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

1.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Lasem ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025;

2. Dalam penyusunan RDPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang. Begitu pula dalam penyusunan DPPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Rembang.

2.1 Rencana Tindak lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kabupaten Rembang Tahun 2025 pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Rembang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan Program dan Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2025.

Lasem, 01 Juli 2025



